

# **BAB I**

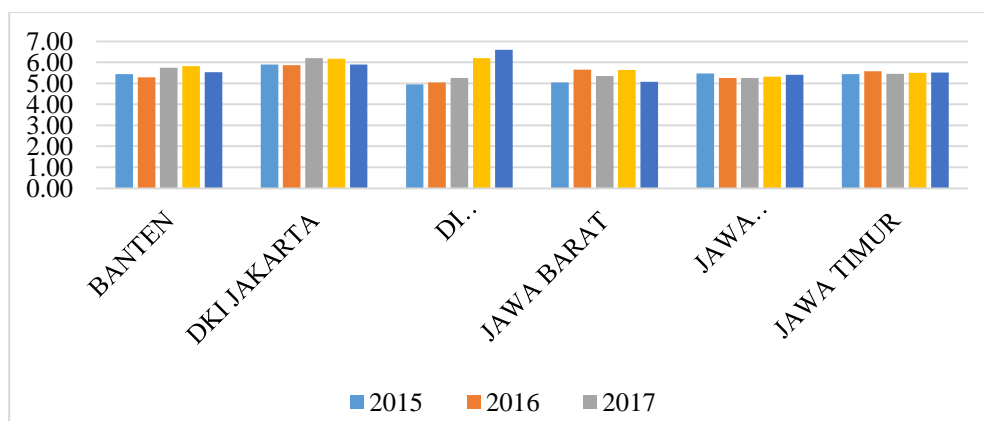
## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur utama suatu negara atau daerah untuk melihat perkembangan perekonomian dari periode ke periode berikutnya. Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik meyakini bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu yaitu peningkatan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi (Sukirno, 2000:451). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hasil nyata dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu daerah. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila pencapaian output yang diterima dari kegiatan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya.

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah daerah di era sekarang ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bukti bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah memberikan dampak yang positif khususnya provinsi di pulau Jawa. Secara empiris berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi pulau Jawa menunjukkan hasil yang positif meski terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019 sebesar 1,8 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen. Kenaikan maupun penurunan

pertumbuhan ekonomi di pulau jawa tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Secara lebih ringkas peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



**Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019**

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Gambar 1.1 dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diketahui setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan meskipun ada fluktuasi kecil di beberapa provinsi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2019 tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional. Secara keseluruhan, perlambatan pertumbuhan ekonomi provinsi hanya berkisar antara 0 hingga 2 persen, hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi provinsi masih dalam kondisi yang relatif tinggi dan stabil.

Secara umum penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 menurut Suhariyanto kepala Badan Pusat Statistik, salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan sektor industri pengelolaan yang melemah.

Pada tahun 2019 sektor industri hanya tumbuh 3,8 persen. Penyebab lain ialah tiga *leading sector* penggerak utama perekonomian di Pulau Jawa juga mengalami penurunan yaitu tertuju pada sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan PDRB mengalami penurunan.

Melihat pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perekonomian, terutama terkait sektor-sektor utama yang berkontribusi besar terhadap output nasional maka perlu digali dan dikembangkan. Pengelolaan sumberdaya di wilayah kabupaten/kota yang efektif dan efisien menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan untuk mengembangkan potensi daerahnya melalui dana alokasi, untuk selebihnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Disinilah kontribusi pemerintah daerah dilihat sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan pengelolaan daerah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui UU nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta UU nomor 25 tahun 1999 yang diganti dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tersebut menjadi dasar diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan lebih menekankan pada otonomi daerah yaitu pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk menyusun, mengatur, serta mengurus daerahnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi peluang bagi suatu daerah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah melalui peningkatan potensi daerah secara efisien baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki. Hakekat otonomi dan desentralisasi fiskal diterapkan tidak hanya menjalankan tugas dari pemerintah pusat, melainkan daerah benar-benar dituntut untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi daerah.

Desentralisasi sendiri dipandang sebagai langkah atau cara untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993). Pada negara berkembang. Hidayat (2005) menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa negara berkembang menganggap penting peranan desentralisasi fiskal, diantaranya menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk memperluas otonomi daerah, dan sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kerap dikaitkan dengan besaran pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer yang diterima masing masing daerah. Besaran dana transfer yang diterima oleh masing-masing daerah memiliki kapasitas yang berbeda. Perbedaan dana transfer tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Suatu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi tentunya akan mendapatkan pasokan dana transfer yang berupa dana alokasi umum (DAU)

yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Tujuan dari pemberian dana transfer daerah ini menurut Sidik (2009) yaitu menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat ke daerah).

Hasil empiris dari beberapa penelitian yang dilakukan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Zhang dan Zou (1998) dalam penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Desai et al. (2003) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan menurut Swasono (2007) menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang negatif. Melihat banyaknya perbedaan dari beberapa pendapat terkait pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, Breuss dan Eller (2004) menyatakan bahwa adanya efek ambivalent dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Efek ambivalent yang dimaksudkan yaitu sulitnya untuk menarik rekomendasi yang tepat tentang bagaimana desentralisasi yang optimal. Breuss dan Eller menyimpulkan bahwa belum adanya kejelasan, atau hubungan otomatis desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi lain mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi salah satunya dikemukakan oleh Thiessen (2003) yang melihat pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak berhubungan linear melainkan berbentuk kuadratik. Hubungan akan berbentuk hump-shaped apabila pada suatu daerah dengan derajat desentralisasi yang masih rendah maka kebijakan desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh yang positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada derajat desentralisasi yang sudah terlampau tinggi justru kebijakan desentralisasi fiskal akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi Pulau Jawa salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Peran pentingnya investasi salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih tinggi sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang. Teori ekonomi makro menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori Harrod-Domar juga menjelaskan bahwa, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki hubungan timbal-balik yang positif dimana peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Menurut Mishkin (2012) pada dasarnya pembangunan ekonomi

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan produktivitas perkapita, investasi sumberdaya manusia, investasi fisik dan kesempatan kerja.

Keadaan iklim investasi di pulau Jawa sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang baik. Data Badan Pusat Statistik. Kontribusi investasi pulau Jawa terhadap investasi nasional ini tidak lepas dari dorongan pemerintah provinsi yang mengembangkan daerahnya untuk menarik para investor masuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Minat lokasi PMDN tahun 2019 tertinggi yaitu di DKI Jakarta Rp. 62,1 triliun.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah jumlah penduduk yang besar berarti tenaga kerja yang tersedia juga semakin besar. Dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah maka ini yang akan berpengaruh terhadap tingkat output dalam perekonomian. Output perekonomian yang tinggi dapat dihasilkan dari produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

Selain itu jumlah penduduk yang besar juga akan mempengaruhi luas pasar yang akan menampung barang dan jasa yang dihasilkan. Hal tersebut selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan penduduk yang besar tersebut harus diimbangi dengan kualitas penduduknya. Jika jumlah penduduk yang ada tidak diimbangi dengan kualitas penduduknya ini justru akan menjadi beban bagi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan

ekonomi akan melambat jika jumlah tenaga kerja tidak dapat terserap dengan baik ke dalam lapangan pekerjaan. Kualitas penduduk dalam hal ini tenaga kerja harus ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Dampak diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di setiap provinsi Pulau Jawa sudah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pengembangan potensi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih jauh lagi sejauh mana peranan desentralisasi fiskal di provinsi Pulau Jawa ini belum dapat diketahui. Derajat desentralisasi fiskal di provinsi Pulau Jawa dapat dikatakan terlampau tinggi, atau derajat desentralisasi fiskal masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Dengan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, serta melihat pengaruh faktor lain yang meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tenaga kerja. oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang **“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2015 – 2019”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2015-2019?



2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2015-2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2015-2019

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah sebagai referensi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi di daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah, terutama penerimaan daerah yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

## 3. Manfaat Lainnya

Dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Alat dan Metode Analisis

Seperti yang telah disebutkan dimuka, penelitian ini akan mengamati pengaruh desentralisasi fiskal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2015-2019, Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode regresi data panel (pooled data) yang mana akan dipilih pendekatan yang terbaik dari *Common Effect*, *Fixed Effect*, *Random Effect* dengan cara menggunakan suatu uji regresi data panel yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*.

Model analisis dalam penelitian ini memodifikasi jurnal “Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh” yang ditulis oleh Alisman dan Dedi Sufridi (2020) pada variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN). Serta jurnal “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa” yang ditulis oleh Dewi Rosdyana E. S. (2015) pada variabel derajat desentralisasi fiskal dan tenaga kerja. Yang dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 PMDN_{it} + \beta_3 TK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Y = Pertumbuhan Ekonomi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

DF = Drajat Desentralisasi Fiskal

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri

TK = Tenaga Kerja

$\varepsilon$  = Error Term

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yang berupa data panel, yaitu penggabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* yang digunakan adalah 6 Provinsi di Pulau Jawa yaitu (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur) sedangkan data *time series* menggunakan data tahunan mulai dari tahun 2015-2019. Sumber data diperoleh dari beberapa instansi seperti kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut :

### **BAB I LATAR BELAKANG MASALAH**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan variabel penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, metode penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang deskripsi pengolahan data, pembahasan dan hasil analisis data serta implementasi ekonomi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang

direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk dijadikan referensi atau evaluasi dimasa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**